

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab notaris atas pembuatan akta hibah tanah yang kemudian disengketakan oleh ahli waris, dengan studi terhadap Putusan Nomor 33/PDT/2022/PT BDG. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada semakin seringnya akta autentik, khususnya akta hibah, menjadi objek sengketa akibat adanya ketidakpuasan dari pihak ahli waris. Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik memiliki tanggung jawab besar terhadap keabsahan formal akta yang dibuatnya.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur dan dokumen ilmiah terkait. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menelaah ketentuan hukum serta pertimbangan hakim dalam putusan yang diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta yang disengketakan dapat ditinjau dari aspek perdata, administrasi, dan pidana. Secara perdata, notaris dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi para pihak. Namun demikian, dalam Putusan Nomor 33/PDT/2022/PT BDG, hakim berpendapat bahwa pengajuan gugatan secara berulang oleh pihak tergugat tidak serta-merta merupakan perbuatan melawan

hukum, karena merupakan hak setiap orang untuk mencari keadilan melalui jalur peradilan. Oleh karena itu, tanggung jawab notaris tetap bergantung pada adanya unsur kesalahan dan kerugian yang dapat dibuktikan secara hukum.

Kesimpulannya, notaris memiliki tanggung jawab yang besar dalam menjamin keabsahan formal akta, namun tidak serta-merta bertanggung jawab atas setiap sengketa yang timbul, kecuali terbukti adanya kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang kenotariatan, serta menjadi bahan pertimbangan bagi praktisi hukum dalam menangani sengketa terkait akta autentik.

Kata Kunci: Tanggung jawab notaris, akta hibah, sengketa ahli waris, perbuatan melawan hukum.

ABSTRACT

This study aims to analyze the responsibility of a notary in the making of a land grant deed that is subsequently disputed by heirs, with reference to Decision Number 33/PDT/2022/PT BDG. The background of this research is based on the increasing frequency of authentic deeds, particularly grant deeds, becoming objects of dispute due to dissatisfaction among heirs. A notary, as a public official authorized to produce authentic deeds, holds significant responsibility for the formal validity of the deed they create.

The research method used is normative legal research with statutory, case, and conceptual approaches. The legal materials consist of primary legal sources

in the form of legislation and court decisions, as well as secondary legal sources such as literature and related scientific documents. Data analysis is carried out qualitatively by examining legal provisions and the judges' considerations in the studied decision.

The results of the study indicate that a notary's responsibility in disputed deeds can be reviewed from civil, administrative, and criminal aspects. From a civil perspective, a notary may be held liable if proven to have committed an unlawful act that causes losses to the parties involved. However, in Decision Number 33/PDT/2022/PT BDG, the judges considered that the repeated filing of lawsuits by the defendant does not automatically constitute an unlawful act, as it is a legal right of every individual to seek justice through the court system. Therefore, the notary's responsibility depends on the existence of fault and proven legal damage.

In conclusion, a notary bears significant responsibility in ensuring the formal validity of deeds, but is not automatically liable for every dispute that arises unless there is proven negligence or misconduct in the execution of their duties. This research is expected to contribute to the development of legal knowledge, particularly in the field of notarial law, and to serve as a reference for legal practitioners in handling disputes related to authentic deeds.

Keywords: Notary responsibility, grant deed, heir dispute, unlawful act.